

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1.Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan BPBD Kabupaten Pematang Jaya dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 telah terlaksana dengan maksimal dan optimal, karena sudah memenuhi variabel politik dan adminitrasinya dengan bagus. Hal tersebut dapat dilihat mulai dari proses pengambilan keputusan dalam melakukan realokasi anggaran yang APBD dengan cara tetap bepegang pada prinsip penganggaran berbasis kinerja sehingga masih memenuhi unsur akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kepentingan aktor yang terlibat dalam kebijakan ini juga tetap menggunakan kepentingan organisasi sebagai dasar pelaksanaannya. Apabila dilihat dari keterlibatan dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pematang Jaya dalam implementasi kebijakan realokasi dana APBD ini dapat dikatakan mampu dan berhasil untuk menunjang seluruh kegiatan atau program kerja dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. BPBD Kabupaten Pematang Jaya telah merancang manajemen bencana Covid-19 dengan mencakup ketiga fase tersebut, akan tetapi untuk fase rehabilitasi atau pascabencana masih mengalami elaborasi demi terus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Fase pertama yaitu prabencana, dari fase ini BPBD telah merancang pencegahan dan kesiap siagaan dengan melaksanakan program kerja penyemprotan disinfektan. Melalui langkah ini diharapkan mampu menjadi langkah awal untuk menekan persebaran Covid-19 dimasyarakat. Fase kedua

yaitu kedaruratan dan logistik, pada fase ini BPBD telah merancang program kerja yang bermitra dengan instansi kesehatan dalam rangka pengadaan alat medis. Saat bencana Covid-19 berlangsung porsi yang paling besar dalam proses penanganan memang berada di institusi kesehatan, sehingga dari BPBD Kabupaten Pemalang berinisiatif ikut serta berkontribusi dalam pengadaan dan penyaluran alat medis yang dibagikan keseluruh rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Pemalang. Selanjutnya fase ketiga yaitu fase pascabencana, untuk fase ini belum adanya program kerja atau langkah konkret yang akan dilakukan karena pandemi Covid-19 sendiri masih berada difase kedua dalam penanggulangannya. Pasca bencana masih terus mengalami kajian dalam penetapan program kerja, demi menemukan formula yang tepat dalam proses pelaksanaannya nanti.

Penanggulangan bencana ditingkat daerah dijalankan oleh BPBD sesuai dengan aman UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pada masa pandemi BPBD Kabupaten Pemalang mengalami realokasi dana APBD sebagai bentuk percepatan penanggulangan dan menekan persebaran Covid-19 di Kabupaten Pemalang. Setelah melakukan realokasi dana APBD membuka peluang untuk mempercepat penanggulangan Covid-19. Selain, Mempercepat penanggulangan bencana dengan melakukan realokasi anggaran tersebut dapat mempermudah BPBD dalam pembentukan program kerja dan kegiatan yang relevan dengan penanggulangan pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 masuk ditengah satu tahun anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui kebijakan realokasi anggaran tersebut BPBD mampu melahirkan dua program kerja yang mencakup fase pra bencana dan saat

bencana yaitu penyemprotan disinfektan yang kerjakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ( Bidang 1 ), lalu Bidang Kedaruratan dan logistik (Bidang 2) dengan program kerja pengadaan dan penyaluran alat kesehatan ke rumah satit dan puskesmas di suluruh Kabupaten Pematang.

#### **4.2.Saran**

Suatu kebijakan sudah semestinya mampu memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat umum. Apa lagi kebijakan tersebut berkaitan dengan yang namanya keuangan, pastinya akan menjadi hal yang krusial bagi kepentingan banyak pihak. Seharusnya publik juga ikut mengawasi proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah supaya berjalan sesuai dengan kepentingan umum. Peneliti memberikan saran untuk BPBD Kabupaten Pematang untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparasinya dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Seperti misalnya mengunggah data keuangan atau kegiatan yang telah dilakukan diportal Web BPBD, dengan demikian masyarakat ikut melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pematang. Melalui keterbukaan tersebut proses implementasi kebijakan akan berjalan dengan semestinya.